

PERBAIKAN IKLIM USAHA UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI MINYAK SAWIT DAN OLEOKIMIA BERBASIS MINYAK SAWIT DI INDONESIA

Eddy Lukas¹⁾ dan Iyung Pahan²⁾

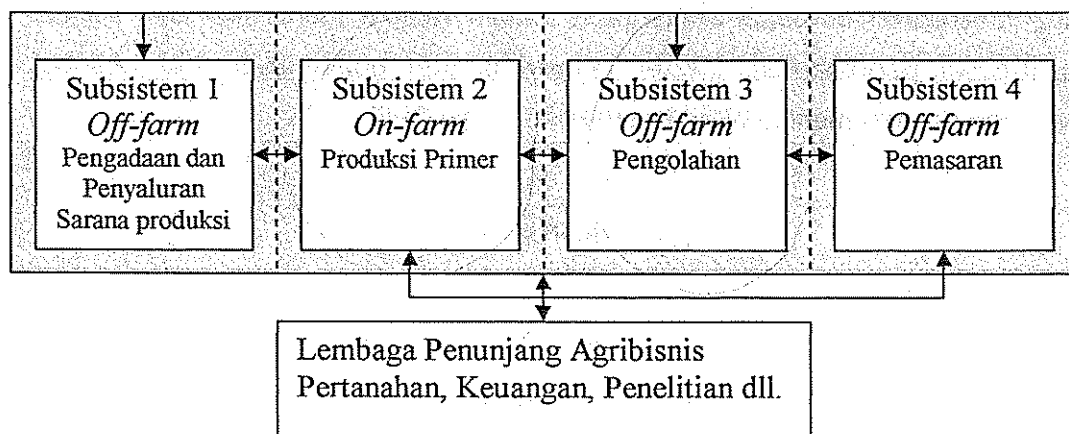
Corporate Affair Director, Asian Agri Int'l, Jakarta. Forum Komunikasi Kelapa Sawit

Head of Estate & Processing Dept., Agrindo Group, Asian Agri Int'l, Jakarta

Sangat dipahami bahwa pembangunan agribisnis kelapa sawit adalah industri yang diyakini bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui berupa lahan yang subur, tenaga kerja yang produktif dan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun. Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dengan hasil minyak per ha yang paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Agribisnis kelapa sawit adalah salah satu dari sedikit industri yang merupakan keunggulan kompetitif Indonesia untuk bersaing di tingkat global.

Kemajuan dalam bidang agribisnis kelapa sawit Indonesia ditandai dengan semakin menyempitnya spesialisasi fungsional dan semakin jelasnya pembagian kerja berdasarkan fungsi-fungsi sistem agribisnis. Usaha agribisnis kelapa sawit Indonesia telah dikembangkan dengan orientasi bisnis untuk mencari keuntungan dengan konsep sistem agribisnis terpadu.

Menurut Soehardjo dalam Sa'id dan Intan (2001), sistem agribisnis terdiri atas subsistem kegiatan pengadaan sarana produksi, kegiatan produksi primer (budidaya), pengolahan (agroindustri), dan pemasaran.

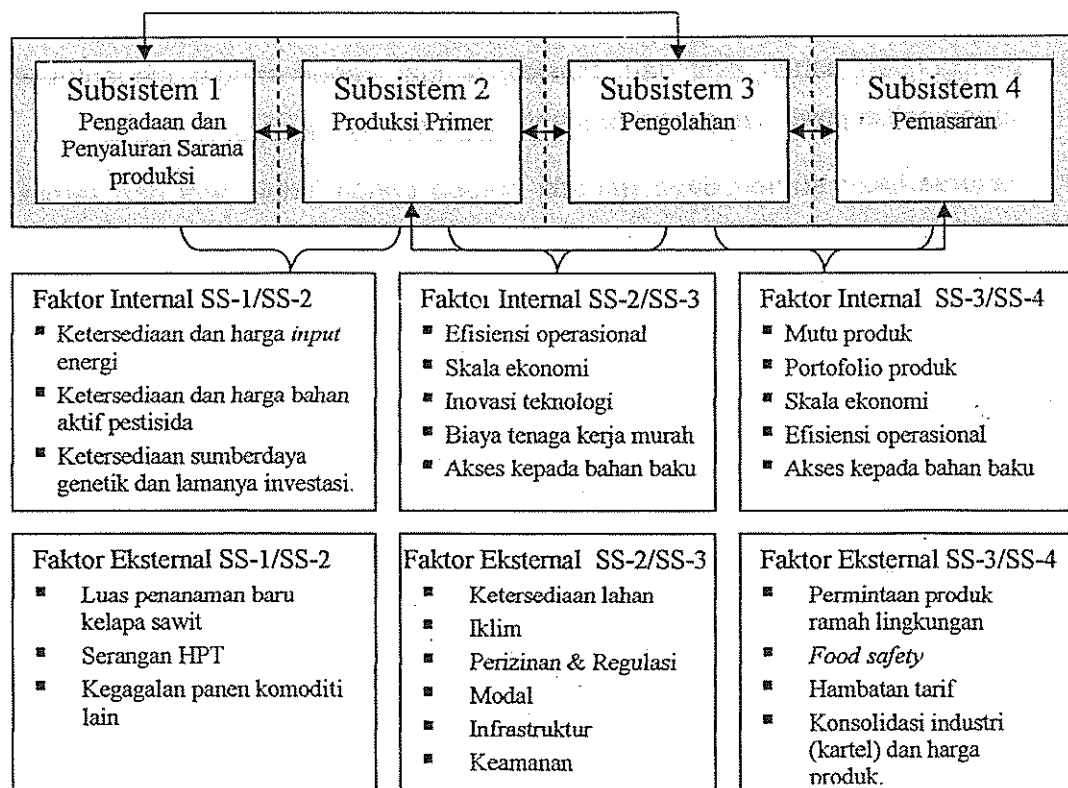


Gambar 1. Sistem Agribisnis dan Lembaga Penunjangnya (Soehardjo, 1997)

1. Keterkaitan Antar Subsistem Agribisnis Kelapa Sawit

Pengembangan agribisnis kelapa sawit Indonesia harus dilakukan secara terpadu dan selaras dengan semua subsistem yang ada didalamnya. Agribisnis kelapa sawit Indonesia akan berkembang dengan baik apabila tidak ada gangguan pada salah satu subsistem. Pada konteks sistem yang holistik dengan mekanisme *input-proses-output*, keberadaan suatu sistem mutlak didukung oleh keberadaan subsistem penyusunnya, sehingga tidak ada subsistem yang lebih penting dari subsistem lainnya.

Setiap subsistem dalam sistem agribisnis kelapa sawit Indonesia mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Tanda panah ke belakang (ke kiri) pada subsistem pengolahan (SS-3 dalam Gambar 2) menunjukkan bahwa SS-3 akan berfungsi dengan baik apabila ditunjang oleh ketersediaan bahan baku yang dihasilkan oleh SS-2. Tanda panah ke depan (ke kanan) pada SS-3 menunjukkan bahwa subsistem pengolahan akan berhasil dengan baik jika menemukan pasar untuk produknya. Derajat keterkaitan antar subsistem agribisnis kelapa sawit Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal pada Gambar 2.



Gambar 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Keterkaitan Antar Subsistem Agribisnis Kelapa Sawit Indonesia (Pahan *et al.*, 2005)

1.1. Faktor yang Mempengaruhi Derajat Keterkaitan SS-1 dan SS-2

Proses pengadaan dan penyaluran sarana produksi (SS-1) merupakan kegiatan agroindustri hulu yang mencakup industri penghasil *input* pertanian, seperti pupuk, pestisida, alat-alat dan mesin pertanian, serta perusahaan penghasil benih kelapa sawit.

Faktor internal dalam SS-1 akan mempengaruhi kinerja dan daya saing komoditi dan produk yang dihasilkan adalah:

- **Ketersediaan energi** (baik BBM maupun LNG) dan tingkat harga *input* energi tersebut. Kasus pabrik pupuk urea (Iskandar Muda dan Pupuk ASEAN di NAD) yang berhenti berproduksi karena ketiadaan pasokan dan mahalnnya harga LNG akan mengakibatkan terhentinya pasokan pupuk urea kepada SS-2. Hanya 69% kebutuhan LNG BUMN pupuk terpenuhi [584 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dari kebutuhan 851.1 MMSCFD] sebagaimana dikatakan Dirut Pusri dalam rapat kerja Meneg BUMN dengan Komisi IV DPR 22 November 2005 malam di Jakarta (Kompas, 23 Nov. 2005, p.1, c.6).
- **Ketersediaan dan harga bahan aktif pestisida** menentukan jumlah pasokan dan harga jual pestisida ke SS-2. Izin impor bahan aktif dan lisensi penggunaan bahan aktif dari *principal* di luar negeri sangat menentukan keberhasilan produsen pestisida menjual produknya ke SS-2.
- **Ketersediaan sumberdaya genetik** berupa pohon induk *dura* dan serbuk sari *pisifera* sangat menentukan keberhasilan rekombinasi sifat-sifat unggul pada persilangan D x P (*tenera*) yang dihasilkan. Waktu minimum yang dibutuhkan untuk menilai kestabilan sifat genetik memerlukan 1 siklus RSS (*Reciprocal Recurrent Selection*) selama 7 tahun. Investasi pemuliaan tanaman dalam waktu yang panjang ini dapat menyebabkan perusahaan penghasil benih kehilangan momentum pasar dan menjadi hambatan alamiah bagi para pemain baru untuk masuk ke industri perbenihan kelapa sawit.

Faktor eksternal yang mempengaruhi derajat keterkaitan SS-1 umumnya datang dari SS-2, melalui mekanisme penawaran dan permintaan :

- **Ekspansi pengembangan kebun kelapa sawit secara masif** pada SS-2 akan meningkatkan permintaan benih kelapa sawit, pestisida, pupuk serta alat-alat dan mesin pertanian yang dihasilkan SS-1.
- **Serangan hama dan penyakit secara masif** pada perkebunan kelapa sawit SS-2 akan meningkatkan permintaan pestisida yang dihasilkan SS-1.
- **Kegagalan panen komoditi lain** seperti padi, kedelai dan bunga matahari (karena banjir, kekeringan, *frost* dll.) akan menyebabkan menurunnya permintaan pupuk yang berdampak pada penurunan harga pupuk internasional. Hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan agroindustri sektor hulu (SS-1).

1.2. Faktor yang Mempengaruhi Derajat Keterkaitan SS-2 dan SS-3

Untuk SS-2 yang menghasilkan produk akhir berupa komoditi, strategi yang paling tepat untuk meningkatkan daya saing adalah strategi *cost-leadership*, yaitu menjadi produsen dengan biaya murah. Keberhasilan strategi ini mengharuskan perkebunan kelapa sawit memiliki rangkaian biaya terintegrasi yang paling rendah, dan produk yang ditawarkan harus dipersepsi sebagai hal yang dapat dibandingkan dengan pesaing, dan dapat diterima oleh pembeli. Faktor internal dalam SS-2 yang mempengaruhi kinerja dan daya saing komoditi (Tandan Buah Segar, TBS) yang dihasilkan adalah:

- **Efisiensi operasional** dengan meningkatkan *output* pada tingkatan *input* yang wajar. Hasil akhirnya adalah unit biaya yang lebih kompetitif sehingga dapat menghasilkan rangkaian biaya terintegrasi yang lebih murah dari kompetitor.
- Perkebunan kelapa sawit adalah usaha jangka panjang yang baru akan menghasilkan setelah 3 tahun ditanam di lapangan. Pada kondisi ini diperlukan investasi besar dalam luasan lahan tertentu. Untuk memaksimalkan manfaat biaya tetap (*fixed cost*) dan pembebanannya kepada harga pokok, perkebunan kelapa sawit harus mencapai **skala ekonomi** (*economy of scale*) dengan luasan minimum 5,000 ha per unit kebun.
- **Inovasi teknologi** dengan menggunakan benih unggul yang produksinya lebih tinggi per satuan luas, dibarengi dengan penerapan mekanisasi

pembukaan lahan (*land clearing*) dan mekanisasi evakuasi TBS dari lapangan akan menurunkan harga pokok per unit.

- Perkebunan kelapa sawit bersifat padat karya karena setiap ha kebun memerlukan tenaga kerja 0.2 orang. Biaya tenaga kerja murah dibarengi dengan produktivitas yang tinggi akan menurunkan harga pokok per unit. Diskriminan daya saing produk perkebunan Indonesia sejak jaman tanam paksa dahulu adalah **tenaga kerja yang murah**.
- Komponen utama biaya pemeliharaan tanaman kelapa sawit adalah pupuk (60%). **Akses kepada bahan baku** yang lebih baik akan menurunkan unit biaya produksi.

Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja dan keberadaan SS-2 adalah:

- Lahan adalah matriks tempat tanaman berada. Tanpa lahan, tanaman kelapa sawit tidak akan ekonomis untuk diusahakan secara komersial. Lahan yang optimum untuk kelapa sawit harus mengacu pada 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor sifat fisik lahan dan faktor sifat kimia tanah atau kesuburan tanah (Pangudijatno dan Purba, 1987). **Ketersediaan lahan** yang sesuai merupakan faktor utama keberhasilan pengembangan SS-2. Tidak tersedianya lahan yang sesuai untuk budidaya kelapa sawit, akan menyebabkan ekstensifikasi SS-2 terhambat. Sebagai pembanding, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Malaysia Barat (Semenanjung) telah terhenti karena faktor lahan, sehingga mereka terpaksa mengalihkan ekspansinya ke Malaysia Timur dan Indonesia.
- **Iklim yang favorable** sangat mendukung keberhasilan SS-2. Penyimpangan pola iklim yang ekstrim seperti terjadinya kemarau panjang dan kabut asap akan menurunkan efisiensi fotosintesis dan produksi TBS per satuan luas. Selain itu, faktor iklim juga mempengaruhi penurunan produksi secara tidak langsung karena meningkatnya *losses* (kehilangan) pasca panen seperti buah restan (tidak terangkut) dan brondolan tidak terkutip pada musim penghujan.
- Pemerintah harus secara jelas dapat memberikan kepastian formal tentang perizinan penyelenggaraan (*license to operate*). Untuk usaha perkebunan diberikan HGU dengan jangka waktu selama-lamanya 35 tahun dan diperpanjang 25 tahun. Yang harus dipertimbangkan adalah sistem

perpanjangan berdasarkan *track record* penggunaan lahan perkebunan sebelumnya. Dengan diterapkannya otonomi daerah, masalah perizinan yang kompleks dari tingkat kota/kabupaten dikhawatirkan akan menambah panjangnya birokrasi perizinan yang makin menghambat terciptanya SS-2 yang kompetitif. Peranan Pemerintah sebagai fasilitator sebaiknya jangan terjebak dalam ambisi regulasi yang berlebihan (*over regulated*) – sehingga dalam pelaksanaannya sering sekali tidak dapat menegakkan aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

- Investasi untuk membangun kebun memerlukan modal yang besar dan waktu pengembalian yang lama, tidak dapat ditarik kembali (karena terikat dengan lahan), serta begitu pembukaan lahan dilakukan maka investasi tidak dapat ditunda lagi dan harus dilakukan sampai kebun selesai dibangun. Keberhasilan pengembangan SS-2 sangat tergantung kepada komitmen investasi. Tanaman kelapa sawit baru mulai menghasilkan pada tahun 3. Pengembangan kebun kelapa sawit memerlukan dana yang besar dengan jangka waktu pengembalian hutang 7-9 tahun. Dana untuk pengembangan SS-2 ini harus didukung oleh sektor perbankan.
- Kecenderungan praktek pertanian (perkebunan) yang semakin terdesak ke arah lahan yang “marjinal” dan semakin menjauh dari daerah pemukiman tradisional, menuntut pengembangan teknologi (*baca: Rupiah*) untuk mengatasi kondisi ke-marjinal-an lahan, terpadu dengan pengembangan **infrastruktur** wilayah-baru tersebut. Dengan kata lain, pemanfaatan lahan selain mengacu pada konsep kelas kesesuaian lahan, juga harus mempertimbangkan pengembangan infrastruktur (oleh pemerintah) di masa yang akan datang.
- **Keamanan** adalah salah satu faktor penentu yang mempengaruhi pengembangan SS-2. Meningkatnya harga jual CPO yang berdampak pada meningkatnya harga jual TBS pada tingkat petani, merangsang sindikat “oknum-oknum tertentu (*ninja*)” untuk mencuri TBS dari perkebunan. Minat para investor untuk mengembangkan SS-2 akan menurun karena tidak adanya jaminan untuk memperoleh hasil yang baik, walaupun mereka sudah melakukan penanaman dan tindakan kultur teknis yang baik. Tindakan para *ninja* ini merugikan SS-2 dalam jumlah yang material disamping

mempengaruhi aspek psikologis akan rasa aman bagi pengelola SS-2 itu sendiri.

1.3. Faktor yang Mempengaruhi Derajat Keterkaitan SS-3 dan SS-4

Untuk SS-3 yang menghasilkan produk akhir berupa barang semi komoditi dan barang jadi, strategi yang paling tepat untuk meningkatkan daya saingnya adalah strategi diferensiasi, yaitu membuat dirinya menjadi unik dalam industrinya sehingga lebih dihargai oleh para pembelinya. Daftar atribut organisasi yang bisa dibedakan dengan organisasi lainnya mencakup hal seperti mutu, kecepatan, kecanggihan disain, pelayanan luar biasa, atau suatu citra merek dagang yang positif. Kuncinya adalah atribut yang dipilih harus berbeda dengan yang ditawarkan oleh pesaing dan cukup nyata untuk membenarkan tambahan harga ekstra yang melebihi biaya untuk melakukan diferensiasi tersebut.

Faktor internal yang mempengaruhi derajat keterkaitan SS-3 dan SS-4 adalah:

- **Mutu produk** yang dihasilkan. Semakin tinggi mutu produk yang dikaitkan dengan standar mutu tertentu seperti *International Standardization Organization* (ISO), *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Hazards Analyses Critical Control Point* (HACCP) akan menyebabkan produk lebih mudah dan lebih cepat diserap pasar.
- **Portofolio produk** yang dihasilkan. Semakin banyak jenis produk yang dihasilkan, semakin mudah proses penjualannya ke pasar.
- **Skala ekonomi** dalam hubungan dengan kapasitas pengolahan. Semakin besar kapasitas pengolahan akan menyebabkan unit biaya semakin murah karena tercapainya skala ekonomi.
- **Efisiensi operasional** dengan meningkatkan *output* pada tingkatan *input* yang wajar. Hasil akhirnya adalah unit biaya yang lebih kompetitif sehingga dapat menghasilkan rangkaian biaya terintegrasi yang lebih murah dari kompetitor.
- **Akses kepada bahan baku** yang lebih terjamin dengan harga yang murah dan mutu yang baik akan melindungi keberadaan industri hilir. Konsolidasi vertikal antara industri hulu dan hilir akan memberikan keamanan investasi

pada setiap keadaan, karena pada situasi harga CPO yang rendah, industri hilir akan memberikan margin yang lebih tinggi sehingga bisa menutupi kerugian di sektor hulu. Sebaliknya pada kondisi harga CPO mahal, industri hulu akan memberikan margin yang lebih tinggi untuk menutupi kerugian di sektor hilir.

Faktor eksternal yang mempengaruhi derajat keterkaitan SS-3 dan SS-4 adalah:

- Meningkatnya **permintaan produk akhir kelapa sawit yang ramah lingkungan** (*green products*), sebagai akibat meningkatnya kesadaran masyarakat negara maju akan pentingnya lingkungan hidup. Produk yang tidak ramah lingkungan dipersepsikan sebagai produk yang tidak berkesinambungan (*non sustainable products*). Peningkatan kesadaran lingkungan ini akan mempengaruhi paradigma dan cara beroperasi agribisnis kelapa sawit Indonesia, karena sebagian besar produknya ditujukan untuk pasar ekspor. Hal ini membawa pada perubahan radikal cara pengelolaan agribisnis kelapa sawit Indonesia seperti melakukan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero burning*), penerapan konsep hutan bernilai konservasi tinggi (*high conservation forest value*, HCVF), sistem manajemen lingkungan (*environment management system*, EMS-ISO 14001) dll. Meningkatnya kesadaran konsumen akan **keamanan produk**. Secara global – tantangan agribisnis kelapa sawit Indonesia semakin meningkat, terutama disebabkan oleh kecenderungan (*trend*) dunia. Masalah tuntutan asal-usul suatu produk (*traceability*) dari kebun sampai ke konsumen (*from farm to the plate*) dan kaitannya dengan masalah bio-terorisme yang banyak dipermasalahkan di negara maju, membutuhkan peningkatan kinerja manajemen agribisnis kelapa sawit Indonesia secara fundamental. Pengelolaan SS-2 dan SS-3 tidak dapat lagi bersandar hanya berdasarkan metode pengelolaan tradisional – tetapi harus juga mampu meningkatkan kinerja dan standarnya sesuai dengan tuntutan zaman.
- Adanya hambatan tarif (*tariff barrier*) dari sisi negara pengekspor (pajak ekspor) maupun negara pengimpor (bea masuk) menciptakan keseimbangan baru dalam permintaan dan penawaran di pasar. Pajak ekspor merupakan dis-insentif terhadap SS-3 dan SS-2 agribisnis kelapa sawit Indonesia karena timbulnya *society loss* yang sejatinya merupakan bagian dari surplus produsen. Bea masuk di negara pengimpor

menyebabkan berkurangnya jumlah produk kelapa sawit Indonesia yang diimpor ke negara tersebut. Kombinasi pajak ekspor di Indonesia dan bea masuk di negara tujuan akan mengorbankan SS-2, SS-3 dan SS-4 agribisnis kelapa sawit Indonesia.

- Terjadinya konsolidasi pelaku agribisnis SS-3 dan SS-4 dunia melalui merger dan akuisisi menyebabkan pasar CPO dan produk turunannya dikuasai oleh segelintir pelaku pasar seperti *Unilever, Cargill, Aarhus/Anglia, Safic Alcan, Henkel/Cognis, ICI/Uniqema, Kuok, Golden Hope/Guthrie*. Hal ini menjurus pada pembentukan kartel yang akan mempengaruhi keseimbangan harga CPO internasional dan praktek pendiktean harga dari SS-4 kepada SS-3 dan SS-2.

2. Integrasi Vertikal Sistem Agribisnis Kelapa Sawit

Konsep integrasi vertikal sistem agribisnis kelapa sawit merupakan keterpaduan sistem komoditas secara vertikal yang membentuk suatu rangkaian pelaku-pelaku (*agribusiness participant system*) yang terlibat dalam sistem tersebut, mulai dari produsen/penyediaan input/sarana produksi pertanian, distributor input/sarana produksi, usaha tani, pedagang pengumpul, pedagang besar, usaha pengolahan hasil pertanian (agroindustri), pedagang pengecer, eksportir, sampai dengan konsumen domestik dan internasional.

Arah panah ke atas menunjukkan aliran produk dan sebaliknya merupakan arah aliran uang atau nilai produk. Di luar sistem aliran produk dan uang tersebut terdapat para fasilitator mekanisme sistem yang berperan sebagai pembina dan pemadu sistem (*agribusiness coordinator system*) seperti pemerintah, manajer, pendidik dan peneliti.

Pemerintah berperan sebagai pembina, pengatur, dan pengawas beroperasinya mekanisme sistem agribisnis kelapa sawit secara vertikal. Pembinaan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memperkuat ikatan keterpaduan antar pelaku. Pengaturan dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak dan kewajiban antar pelaku secara proporsional, sekaligus menyediakan sarana pelayanan yang mampu menjamin terselenggaranya integrasi sistem agribisnis kelapa sawit dengan kuat. Pengaturan ini tidak dimaksudkan sebagai campur tangan pemerintah pada sistem agribisnis kelapa sawit secara langsung (seperti tata niaga), atau sebagai

pelaku. Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menjamin terselenggaranya sistem agribisnis kelapa sawit berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan proporsional. Dengan pengawasan ini, pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan pengendalian apabila terjadi penyimpangan arah dan tujuan sistem.

Manajer merupakan perpanjangan tangan para pelaku untuk menjalankan fungsi manajemen di dalam sistem agribisnis kelapa sawit, yaitu membawa keteraturan dan konsistensi dengan menggunakan perencanaan yang formal, merancang struktur organisasi, dan memonitor hasil dibandingkan dengan rencana (Pahan, 2004).

Kelembagaan pendukung yang berasal dari pendidik berperan sebagai pendidik, penyuluh, dan pembimbing para pelaku sistem agribisnis kelapa sawit, sehingga setiap pelaku dapat bekerja dan memiliki kualifikasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam sistem agribisnis kelapa sawit tersebut.

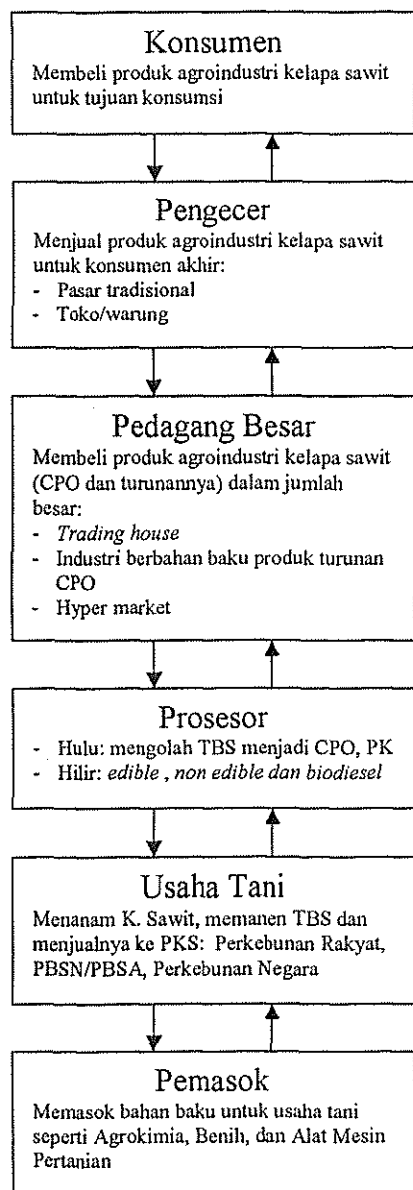
Peneliti berperan dalam penelitian, pengembangan, serta perancangan sistem beserta unsur-unsurnya secara terus menerus. Integrasi vertikal hanya dapat terselenggara apabila terdapat hubungan yang saling menguntungkan secara proporsional dan saling mendukung antar pelaku dalam sistem agribisnis kelapa sawit. Keterkaitan yang saling menguntungkan secara proporsional tersebut merupakan pondasi yang kuat untuk membangun integrasi vertikal karena terdapatnya jaminan pemenuhan hak dan kebutuhan para pelaku (Sa'id dan Intan, 2001).

3. Pohon Industri Agribisnis Kelapa Sawit

Pembangunan yang berkesinambungan haruslah dapat menjawab dua tantangan utama nasional yang merupakan dua sisi keping mata uang yang merupakan suatu kesatuan, yaitu:

- Memiliki daya saing global pada seluruh subsistem komoditas, baik pada industri hulu kelapa sawit itu maupun industri hilirnya.
- Dapat menjawab kebutuhan nasional dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Para Pelaku



Para Pembina dan Pemadu Sistem

Pemerintah

- Keamanan produk
- Konsumsi produksi dalam negeri

- Kredit MKM
- Harga eceran tertinggi (sembako)

- Promosi pemerintah ke pemerintah (G to G)

- Insentif pajak
- Kemudahan perizinan
- Pengembangan industri hilir

- UU Perkebunan
- HGU/HGB
- Kemitraan (plasma/KKPA)

- Subsidi
- Sertifikasi
- Protokol keamanan
- Kandungan lokal

Manajer

- Keamanan produk (barang jadi)

- Keuntungan
- Ketersediaan produk

- Keuntungan
- Distribusi produk

- Keuntungan (*profit*)
- Orang (*people*)
- Lingkungan (*planet*)

- Keuntungan (*profit*)
- Orang (*people*)
- Lingkungan (*planet*)

- Standarisasi mutu

Pendidik

- Mendidik konsumen tentang pengetahuan keamanan produk

- Mendidik pengecer dalam manajemen eceran

- Mendidik tenaga kerja siap latih dalam bidang pemasaran dan SCM

- Mendidik tenaga kerja siap latih dalam bidang agroindustri kelapa sawit

- Mendidik tenaga kerja siap latih dalam bidang perkebunan kelapa sawit

- Mendidik tenaga kerja siap latih dalam bidang pemuliaan tanaman dan teknik mesin.

Peneliti

- Meneliti perilaku konsumen dalam masyarakat.

- Meneliti perilaku konsumen dalam bisnis eceran.

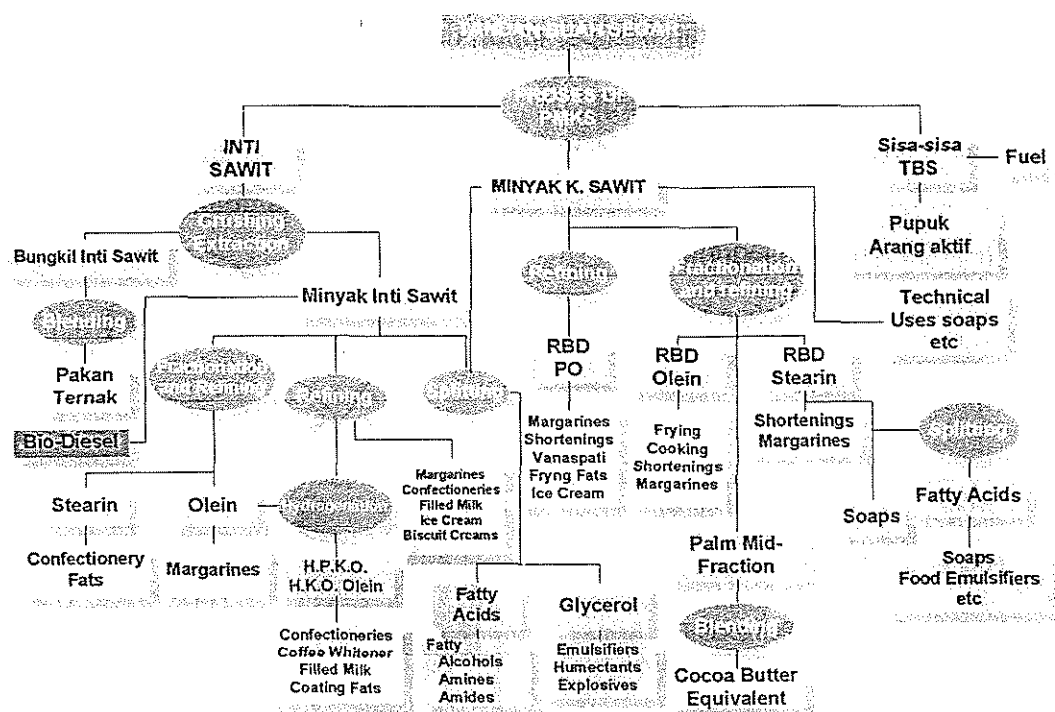
- Tinjauan pasar
- Intelijen bisnis

- Meneliti pengembangan portofolio produk industri hilir *edible* dan *non-edible* seperti *oleo-chemical* dan *biodiesel*

- Peningkatan daya saing komoditi.
- Perbaikan rancang bangun mesin produksi

- Perbaikan *safety fact*
- Perbaikan genetik (pemuliaan) k. sawit.
- Perbaikan rancang bangun mesin produksi

Dalam konsep pertanian yang holistik dianut pandangan bahwa setiap bagian tanaman sejak panen dapat dijadikan bahan dasar industri secara berantai. Paham ini melahirkan efek berganda (*multiplier effects*) yang disebut pohon industri pertanian. Pohon industri agribisnis kelapa sawit secara umum disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pohon Industri Agribisnis Kelapa Sawit (PORIM dalam Pahan et al., 2005).

Dengan model pohon industri ini, agribisnis kelapa sawit mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia melalui peningkatan nilai tambah, ekspor, pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Nilai tambah yang didapatkan sepanjang *value chain* agribisnis kelapa sawit didapat dari konversi bahan baku (sumber daya alam) menjadi bahan baku proses (TBS), bahan setengah jadi (CPO dan PK), dan bahan jadi (produk akhir baik *edible* maupun *non edible*).

Efisiensi biologis dari sistem perkebunan dapat diukur dengan membandingkan energi *output* yang dihasilkan (*palm product*) dengan energi *input* (Koto, 1989):

$$\text{Efisiensi Biologis (Be)} = \frac{\text{Energi output (Joule)}}{\text{Energi input (Joule)}} \dots\dots\dots (1)$$

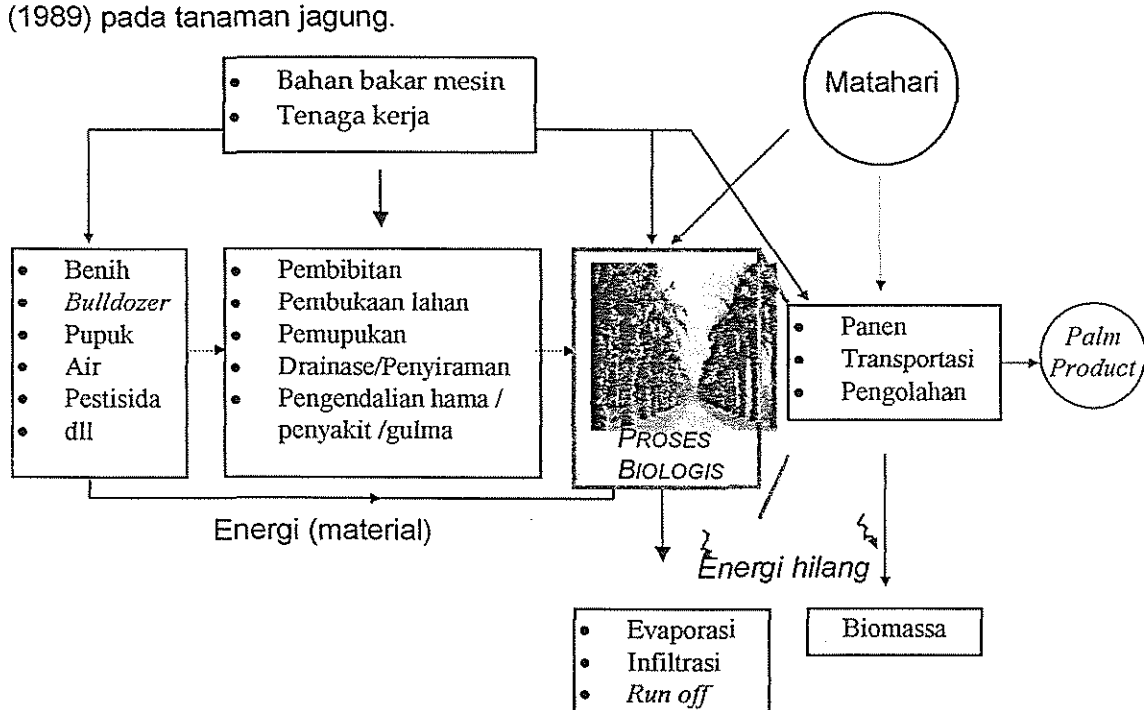
$$\text{Efisiensi Biologis (Be)} = \frac{Y}{A + B} \dots\dots\dots (2)$$

dimana Y = Produksi tanaman dalam satuan setara energi (J)

A = Input tenaga kerja, bahan bakar, listrik dll. dalam satuan setara energi (J)

B = Input material berupa input fisik (mesin dan peralatan), input biologis (benih dll.), dan input kimia (pupuk, pestisida dll.) dalam satuan setara energi (J).

Arus energi dalam proses produksi di perkebunan kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 4. Konsep ini diadaptasi dari model yang dikembangkan oleh Koto (1989) pada tanaman jagung.



Gambar 4. Arus energi dalam proses produksi di perkebunan kelapa sawit (dimodifikasi dari Koto, 1989)

Bila arus energi dikonversi dalam satuan finansial (Rupiah) maka pembukaan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit akan memberikan surplus (mencapai titik impas) mulai dari tahun ke-9. Artinya dengan mengkonversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit akan memberikan nilai tambah secara finansial. Demikian juga dengan pengolahan bahan setengah jadi seperti TBS menjadi produk CPO dan PKO pada SS-3, serta pengolahan lebih lanjut CPO dan PKO menjadi produk akhir (*edible* dan *non edible*) akan memberikan nilai tambah secara finansial.

Kontribusi produk agribisnis kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia secara makro pada tahun 2004 adalah:

- 11.4 juta ton CPO x USD 350/ton = USD 4.00 milyar/tahun.
- 2.5 juta ton PKO x USD 175/ton = USD 0.44 milyar/tahun.

Dengan asumsi konsumsi minyak goreng nasional per kapita 12 kg/kapita, maka kebutuhan minyak goreng dalam negeri untuk 220 juta orang adalah 2.64 juta ton minyak goreng yang setara dengan 3.80 juta ton CPO. Artinya, kelebihan produksi CPO Indonesia sebesar 7.2 juta ton CPO memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan ekspor.

Berdasarkan hasil penelitian *World Bank* di Afrika, penanaman tanaman tahunan telah berhasil mengatasi masalah kemiskinan di sana. Walaupun belum dilakukan penelitian yang mendalam, pengembangan kebun kelapa sawit diyakini bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan agribisnis kelapa sawit berarti memecahkan masalah kemiskinan karena memberikan kesempatan kerja dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan. Dengan standar kebutuhan tenaga kerja 0.2 orang/ha yang langsung bekerja di perkebunan, dan 0.2 orang/ha lagi yang secara tidak langsung mendapat pekerjaan di industri hilir dan logistik, maka pengembangan 5 juta ha kelapa sawit akan memberikan kesempatan kerja kepada 2 juta orang (0.4 orang/ha x 5 juta ha).

Dengan asumsi setiap keluarga terdiri dari suami istri dengan 3 orang anak, maka jumlah penduduk yang bergantung dari 5 juta ha kebun kelapa sawit ini adalah 10 juta orang. Ini adalah angka yang cukup signifikan untuk memecahkan masalah pengangguran di Indonesia, sekaligus memecahkan masalah kemiskinan.

Agribisnis kelapa sawit adalah industri yang kompetitif bagi Indonesia untuk bersaing secara global. Industri ini adalah industri yang baik untuk negara, baik untuk masyarakat, dan juga baik untuk pelaku yang mengembangkannya. Untuk itu, analisis masalah dan usaha perbaikan iklim usaha agribisnis kelapa sawit sangat tepat untuk dibahas dalam forum seperti hari ini, sehingga nantinya industri ini akan menjadi penghela ekonomi nasional dan memberikan kemaslahatan yang lebih banyak lagi kepada rakyat Indonesia.

4. Perbaikan Iklim Usaha Agribisnis Kelapa Sawit

4.1. Pendanaan

4.1.1. Rumusan Permasalahan:

Keberhasilan pengembangan kebun sangat tergantung kepada komitmen investasi. Investasi untuk membangun kebun memerlukan dana yang besar dan waktu pengembalian yang lama, tidak dapat ditarik kembali (karena terikat dengan lahan), serta begitu pembukaan lahan dilakukan maka investasi tidak dapat ditunda lagi dan harus dilakukan sampai kebun selesai dibangun. Pengembangan kebun kelapa sawit memerlukan dana yang besar dengan jangka waktu pengembalian hutang 7-9 tahun, karena tanaman kelapa sawit baru mulai menghasilkan pada tahun 3. Dana untuk pengembangan kebun ini harus didukung oleh sektor perbankan.

Kondisi perbankan saat ini terlihat sangat hati-hati dalam memberikan pinjaman kepada nasabah korporat karena trauma kredit macet masa lalu seperti kasus ditahannya Dirut Bank Mandiri. Untuk mempercepat pembangunan kebun kelapa sawit sebagai sarana penciptaan lowongan kerja, sektor perbankan harus merubah arah kebijakan dengan menyalurkan dana pinjaman ke sektor real ketimbang memarkir uangnya pada instrumen keuangan seperti SBI.

Agribisnis perlu insentif untuk meningkatkan daya saing seperti keringanan bunga pinjaman untuk industri yang diprioritaskan pengembangannya seperti kelapa sawit. Dibandingkan dengan China dan negara-negara ASEAN, bunga perbankan di Indonesia masih lebih tinggi sekitar 10 persen. Pemerintah perlu memberikan alternatif sumber pembiayaan jangka panjang yang berbunga rendah untuk membiaya investasi perkebunan kelapa sawit guna mendorong investasi dalam bidang ini.

4.1.2. Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan

- Kredit tidak tersedia karena kondisi perbankan yang sangat hati-hati dalam memberikan pinjaman kepada nasabah korporat (trauma kredit macet masa lalu).
- Kalaupun tersedia, suku bunga pinjaman mengikuti rate komersial yang lebih tinggi sekitar 10% dari China dan negara ASEAN lainnya.

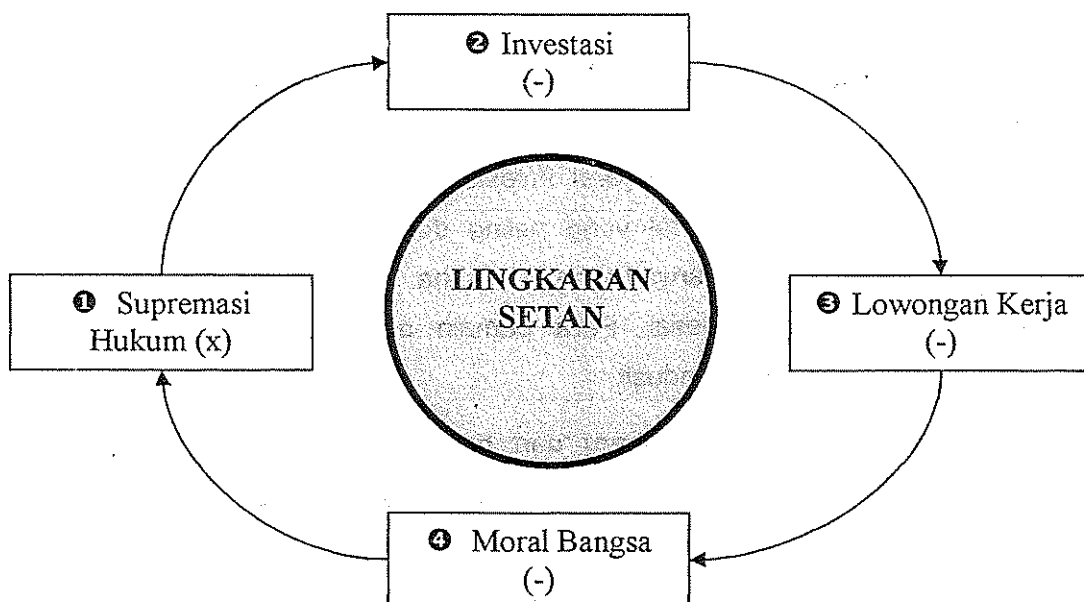
4.1.3. Solusi Permasalahan

- Melakukan lobby kepada DPR untuk mengamandemen UU Bank Sentral, sehingga kredit likuiditas untuk bidang-bidang strategis seperti agribisnis dapat dibuka kembali.
- Dispensasi "*legal lending limit*" karena investasi perkebunan termasuk investasi yang besar, sehingga faktor *legal lending limit* tidak menjadi penghalang investasi.
- Penyertaan Bank Swasta dalam penyaluran kredit dana investasi.
- Pemberian eskalasi kredit karena sifat investasi perkebunan yang bersifat jangka panjang memiliki resiko terhadap inflasi.

4.2. Kepastian Hukum dan Masalah Sosial yang Mengemuka

4.2.1. Rumusan Permasalahan:

Krisis multi dimensi yang menimpa bangsa Indonesia merupakan lingkaran setan yang berdampak pada merosotnya kualitas moral bangsa dan pada akhirnya menurunkan peringkat daya saing negara (lihat Gambar 5). Kondisi lingkaran adalah suatu limit yang menuju nol yang tidak memiliki ujung dan pangkal, serta karenan sifatnya yang buruk dan merusak, maka diasosiasikan dengan setan sehingga menjadi lingkaran setan.



Gambar 5. Krisis Multi Dimensi di Indonesia (Pahan *et al.*, 2005).

Lemahnya penegakan atau tidak adanya supremasi hukum menyebabkan tidak adanya kepastian usaha. Dalam kondisi agribisnis kelapa sawit saat ini, hal ini ditandai dengan adanya beberapa pasal UU Perkebunan yang memberatkan dan mengancam eksistensi pengusaha, pajak ganda (pajak dan retribusi daerah) yang merupakan implikasi otonomi daerah yang "kebablasan," gerakan kemitraan yang tidak proporsional dan cenderung memposisikan pengusaha sebagai lembaga sosial, tumpang tindih lahan perkebunan dengan peruntukkan kehutanan dan pertambangan, serta RTRWP yang tidak sejalan antar instansi pemerintah. Selain itu belum kondusifnya iklim usaha agribisnis kelapa sawit dicirikan dengan adanya masalah penjarahan kebun, keamanan, klaim lahan HGU perusahaan oleh rakyat atas nama hak ulayat, serta prosedur pembangunan perkebunan baru yang membingungkan investor seperti prasyarat kemitraan, izin pembelian bibit, pelepasan hutan, tumpang tindih pemanfaatan lahan tambang, hutan dan kebun.

Tidak adanya kepastian usaha menyebabkan investor enggan menanamkan modal di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas pendanaan dari bank, serta semakin mahal biaya investasi kebun karena mahal biaya modal (*capital expenditure*) pembangunan infrastruktur di daerah pembukaan baru. Semakin kaburnya batas negara dengan adanya daerah perdagangan bebas seperti AFTA, NAFTA, MEE dll. menyebabkan uang tidak memiliki kewarganegaraan lagi. Uang akan mengalir melalui kegiatan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang ke negara yang mampu memberikan hasil terbesar. Prasyarat investasi memerlukan katup pengaman berupa manajemen resiko. Hal yang paling dominan dan mendasar dalam manajemen resiko adalah adanya kepastian usaha. Tidak ada usaha berarti tidak ada bisnis. Permainan selesai. Para pemain akan pergi mencari tempat permainan baru yang lebih kondusif.

Tidak adanya investasi baru dan bahkan terjadinya pelarian modal menyebabkan tidak adanya lowongan kerja baru, bahkan sebagian lowongan kerja yang adapun terancam ditutup. Sejalan dengan menurunnya lowongan kerja secara agregat, sementara pasokan tenaga-kerja-baru ke pasar tenaga kerja tetap tumbuh dengan konsisten, angka pengangguran terbuka akan meningkat. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin berat karena lowongan yang semakin sedikit diperebutkan oleh lebih banyak pelamar. Meningkatnya pengangguran menyebabkan kelompok masyarakat penganggur

yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap, berpotensi menghalalkan segala cara dan akan melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kondisi angka pengangguran terbuka yang telah mencapai level 12 juta orang, serta angka pengangguran terbuka dan tertutup sekitar 42 juta orang, tingkat kejahatan masyarakat akan meningkat drastis. Hancurnya moral bangsa ini terjadi pada seluruh komponen bangsa, yaitu pada rakyat, kelembagaan, dan pemimpinnya. Keterpurukan moral bangsa akan menyulitkan penegakan supremasi hukum. Dalam kondisi ini hukum yang ada bisa saja merupakan hukum yang baik, tetapi permasalahannya ada pada aspek penegakan hukum secara berkeadilan, universal dan non diskriminatif.

Rendahnya penerapan supremasi hukum sebagai dasar berbangsa dan bernegara akan berdampak pada semakin kurangnya arus investasi ke Indonesia. Demikian hal ini akan terus berulang dengan pola spiral negatif yang semakin lama akan semakin mengecil. Pada kondisi ekstrim negatif, praktek berbangsa dan bernegara akan bubar, karena negara sudah tidak mampu menjalankan fungsinya untuk mengatur hajat hidup orang banyak.

4.2.2. Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan

- Lemahnya penegakan atau tidak adanya supremasi hukum yang menyebabkan tidak adanya kepastian usaha.
- Adanya beberapa pasal UU Perkebunan yang memberatkan dan mengancam eksistensi pengusaha.
- Pajak ganda (pajak dan retribusi daerah) yang merupakan implikasi otonomi daerah yang "kebablasan."
- Gerakan kemitraan yang tidak proporsional dan cenderung memposisikan pengusaha sebagai lembaga sosial.
- Tumpang tindih lahan perkebunan dengan peruntukkan kehutanan dan pertambangan, serta RTRWP yang tidak sejalan antar instansi pemerintah.

4.2.3. Solusi Permasalahan

- Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan, universal dan non diskriminatif.
- Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara radikal.
- Pemerintah harus dapat menegakkan kontrak (*contract enforcement*) antara dua pihak/individu.

Pemerintah bertanggung jawab di dalam menjaga penduduknya dari kejahatan terhadap mereka ataupun hak milik mereka.

4.3. Tekanan dari Kelompok Pemerhati Lingkungan

4.3.1. Rumusan Permasalahan:

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional telah meningkatkan tekanan kepada para pengguna minyak sawit dengan kampanye yang sistematis. Mereka mendiskreditkan agribisnis kelapa sawit sebagai industri yang "merusak lingkungan," dengan mengaitkannya pada kerusakan hutan, kebakaran hutan, banjir, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) penduduk lokal, pemiskinan penduduk lokal, pembuangan limbah dan penggunaan pestisida yang berlebihan.

Kepentingan politik masing-masing negara telah menempatkan minyak sawit sebagai pesaing utama minyak nabati subtropik seperti minyak kedelai, canola, dan bunga matahari (yang merupakan produk agribisnis Amerika dan Eropa). Sampai saat ini, WTO sendiri masih belum mendapatkan titik temu untuk perdagangan bebas produk pertanian. Selalu ada masalah subsidi dan hambatan perdagangan yang mengganjal seperti puncak tarif, tarif-tarif yang tinggi, kenaikan tarif, dan hambatan-hambatan non tarif (Chandra, 2005). Perilaku mereka persis seperti masyarakat yang mengecam eksistensi seorang *Spider Man* tetapi tetap membutuhkan kehadirannya untuk memberantas kejahatan. Minyak sawit adalah minyak nabati yang dikecam sebagai "anak haram" dari praktek pertanian dunia, tetapi mereka tetap mencarinya karena manfaat dan harganya yang relatif murah dibandingkan dengan minyak dan lemak nabati lainnya. Karena sifat industri hilir berbahan baku minyak nabati yang memiliki kemampuan sifat saling tukar-menukar (*interchangeable*) tinggi dalam penggunaan berbagai jenis bahan baku, status "anak haram" akhirnya digadaikan demi margin komersial yang lebih tinggi. Oleh karena itu minyak sawit adalah minyak nabati yang paling banyak diperdagangkan di dunia.

Tuhan menciptakan "anak haram" dari suatu konteks peradaban, tentunya sarat dengan maksud-maksud tertentu. Agribisnis kelapa sawit adalah tulang punggung ekspor non migas Indonesia, yang nyata-nyata merupakan aset nasional yang harus dijaga. Status "anak haram" adalah label yang ditempelkan oleh kepincangan sistem label dunia yang diskriminatif. Mereka menuntut Indonesia untuk menjaga keanekaragaman lingkungan hidup supaya menciptakan kemaslahatan bagi dunia, tetapi tidak mau menanggung sebagian

biayanya (*funding for the nature*). Indonesia memiliki harta yang berfungsi juga untuk menjaga mutu lingkungan global, dan apakah kita tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan kita. Apakah konsep menjaga eksistensi hutan-hujan-tropis bagi masyarakat miskin yang kelaparan dan tidak memiliki alternatif lain selain memanfaatkan *asset* hutan yang dimilikinya, merupakan konsep yang kasat mata dan bisa diikuti dengan hati yang besar?

Lalu tiba-tiba, konsumen dari negara-negara yang menyatakan dirinya negara maju, melakukan boikot dan memproklamirkan dirinya tidak mau membeli produk minyak sawit dan turunannya karena alasan yang absurd, yaitu dihasilkan melalui pembukaan lahan dari hutan.

Apakah adil jika kita tidak menyukai salah seorang pemain sepakbola di liga Inggris, lalu kita memutuskan untuk memboikot seluruh team sepakbola yang ada di planet ini? Lalu kita menghimbau semua orang agar tidak menonton pertandingan sepakbola di seluruh dunia, karena salah satu pemain sepakbola di liga Inggris dianggap bermain kasar dan mengingkari peraturan yang berlaku. Apakah ini adil bagi persepakbolaan dunia?

Kunci permasalahan sebenarnya adalah adanya kartel petrokimia yang menguasai dunia dewasa ini, yaitu kartel industri yang menguasai teknologi bahan dasar bagi seluruh industri dan bahan bakar turunan minyak bumi. Kekhawatiran akan habisnya sumber daya minyak bumi yang menjadi tulang punggung kartel petrokimia, telah menyadarkan sebagian masyarakat untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar dari minyak bumi menjadi bahan bakar dari sumber daya yang dapat terbaharui (*renewable resources*), dan salah satu yang mempunyai prospek sangat bagus adalah minyak nabati (*biodiesel* minyak sawit).

4.3.2. Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan

- Kepentingan politik negara-negara produsen minyak nabati yang merupakan kompetitor minyak sawit.
- Tekanan dari kartel petrokimia untuk menisbikan penggunaan minyak nabati sebagai alternatif pengganti BBM.

4.3.3. Solusi Permasalahan

- Perbaikan dalam praktek pembukaan kebun baru, yang mengacu pada konsep 3-P: mencari keuntungan (*profit*), mensejahterakan masyarakat (*people*) dan menjaga lingkungan (*planet*).
- Regulasi yang dibuat harus logis, karena di setiap regulasi pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya yang tidak bisa dihindarkan. Menjaga lingkungan dengan melakukan pembukaan lahan perkebunan tanpa proses bakar (*zero burning*) akan sangat menguntungkan dan menciptakan situasi sama-sama menang bila dilakukan secara terpadu dengan industri bubur kertas misalnya.

4.4. Ketersediaan Lahan yang Sesuai dan Minimnya Infrastruktur

4.4.1. Rumusan Permasalahan:

Lahan adalah matriks tempat tanaman berada. Tanpa lahan, tanaman kelapa sawit tidak akan ekonomis untuk diusahakan secara komersial. Lahan yang optimum untuk kelapa sawit harus mengacu pada 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor sifat fisik lahan dan faktor sifat kimia tanah atau kesuburan tanah (Pangudijatno, Pandjaitan dan Pamin, 1987).

Mengacu pada konsep tersebut, lahan dinilai mempunyai prospek ekonomis yang baik apabila memenuhi seluruh kriteria "baik" pada Tabel Lampiran 1. Setiap berkurangnya kriteria "baik" pada lahan yang akan dibuka, berarti lebih banyak input (*baca: Rupiah*) yang harus diberikan ke dalam sistem perkebunan tersebut. Tentu saja sumberdaya lahan yang tergolong kelas I tersebut semakin lama akan semakin berkurang karena dalam penggunaannya bersaing dengan tanaman pangan, pengembangan wilayah perkotaan dan kawasan industri.

Kecenderungan praktek pertanian (perkebunan) yang semakin terdesak ke arah lahan yang "marjinal" dan semakin menjauh dari daerah pemukiman tradisional, menuntut pengembangan teknologi (*baca: Rupiah*) untuk mengatasi kondisi ke-marjinal-an lahan, terpadu dengan pengembangan infrastruktur wilayah-baru tersebut. Dengan kata lain, pemanfaatan lahan selain mengacu pada konsep kelas kesesuaian lahan, juga harus mempertimbangkan pengembangan infrastruktur (oleh pemerintah) di masa yang akan datang.

Peraturan perkebunan dulu yang mengatur batasan luas penguasaan maksimum 20 ribu hektar per propinsi dan 100 ribu ha untuk seluruh Indonesia

haruslah dicermati secara lebih seksama. Hal ini disebabkan karena banyak perkebunan besar swasta nasional dan PTPN yang telah melampaui batas ini. Alternatif solusi bagi perusahaan yang telah melewati batasan luas penguasaan tanah ini belum pernah dibahas secara rinci dan lintas sektoral. Pemerintah harus memperhatikan faktor skala-ekonomi dan skala-tidak-ekonomi dalam menetapkan batasan suatu luas pengelolaan, selain masalah ketersediaan infrastruktur di daerah tersebut. Sebagai contoh, apabila infrastruktur sudah tersedia secara baik, maka 20 ribu hektar per perusahaan mungkin tidak menjadi masalah—tetapi lain halnya untuk daerah dimana perusahaan harus membangun sendiri seluruh infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan lain-lain sehingga implikasi skala ekonominya membutuhkan batasan luas pengelolaan lahan yang lebih tinggi pula. Pada kasus ini, pemerintah harus mempertimbangkan skala ekonomi perusahaan guna mempertahankan keunggulan daya saing globalnya. Fakta dan data yang ada pada saat ini adalah:

- Belum ada sarana pelabuhan produk kelapa sawit siap pakai yang dibangun pemerintah di luar pelabuhan Belawan (Sumut) dan Dumai (Riau).
- Penjualan produk kelapa sawit yang utamanya berorientasi ekspor harus menggunakan kapal tanker besar sehingga perlu dibuat dermaga dengan kedalaman alur pelayaran minimum 9 meter.
- Tanpa adanya fasilitas tangki timbun (*bulking station*), proses bongkar muat produk sawit di sungai dengan tongkang berpotensi mencemarkan lingkungan.
- Konsentrasi manajemen yang fokus pada masalah lokal memberikan kesempatan untuk pengembangan fasilitas umum dan pengembangan komunitas (CD) yang lebih baik.

4.4.2. Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan

- Pengembangan perkebunan kelapa sawit semakin terdesak ke arah lahan yang "marjinal" dan semakin menjauh dari daerah pemukiman tradisional sehingga menuntut pengembangan infrastruktur baru.
- Pemerintah belum siap mengembangkan infrastruktur baru seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan sehingga investor harus membangun sendiri infrastruktur tersebut.
- Dengan pembatasan luas maksimum perkebunan per provinsi maksimum 20,000 ha, maka skala ekonomi pembangunan infrastruktur tidak akan tercapai.

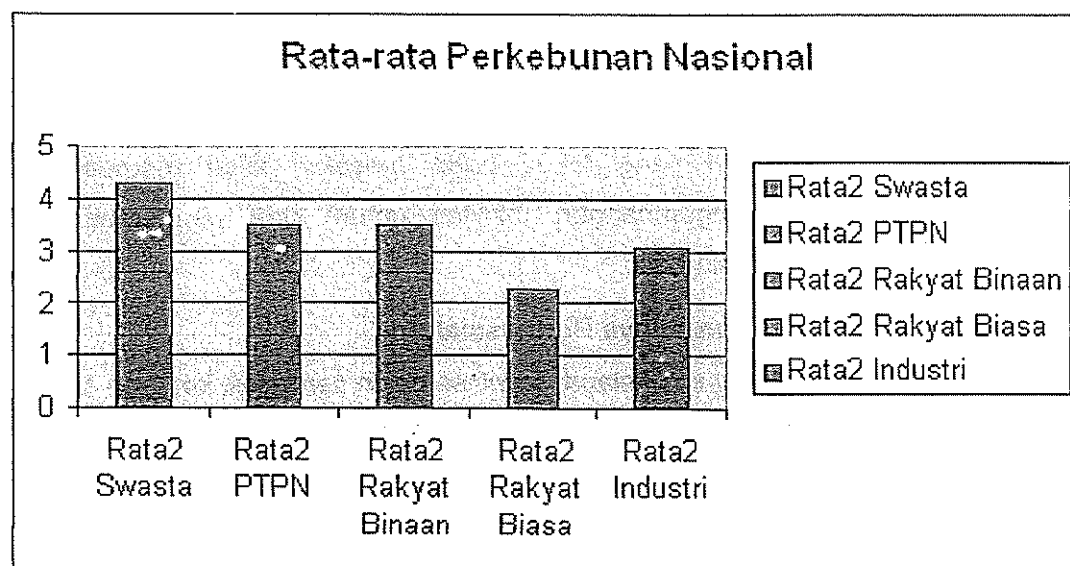
4.4.3. Solusi Permasalahan

- Pemda setempat membuat rencana induk pengembangan perkebunan dengan sistem perwilayahan komoditi yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur.
- Pembangunan infrastruktur dilakukan sendiri oleh investor dengan memberikan kompensasi penguasaan lahan sampai dengan 100,000 ha untuk mencapai skala ekonomi. MoU RI dan RRC pada saat kunjungan Wapres Jusuf Kalla bulan Agustus 2005 menyetujui pengembangan 2,000,000 ha kelapa sawit oleh investor China dengan kompensasi pembangunan infrastruktur.

4.5. Rendahnya Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

4.5.1. Rumusan Permasalahan

Produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini rata-rata masih sangat rendah dibanding, misalnya produksi kelapa sawit Malaysia. Produksi kelapa sawit Malaysia dengan luas perkebunan sekitar 3 juta ha mencapai 15 juta ton minyak sawit mentah (*crude palm oil*, CPO) per tahun (5.0 ton/ha). Adapun Indonesia dengan 5.2 juta ha kebun kelapa sawit hanya menghasilkan 11 juta ton CPO per tahun (2.11 ton/ha).



Gambar 6. Rata-rata Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia 2003 (Sumber: Lin, C.W. *Independent Research & Advisory*)

Soal produksi tandan buah segar (TBS) yang 16 ton/ha/tahun, masih bisa ditingkatkan menjadi di atas 20 ton/ha/tahun (Kompas, 22 September 2005 p.23,

k.6). Walaupun angka yang dikemukakan Direktur Tanaman Tahunan Direktur Jendral Perkebunan pada seminar nasional "Pengembangan Kelapa Sawit" di Samarinda(21/9/05) ini terlihat agak konservatif, pesan yang ingin disampaikan adalah: produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia masih rendah.

Terlepas dari akurasi data yang dimiliki oleh pemerintah, permasalahan rendahnya produktivitas kelapa sawit Indonesia berada pada perkebunan negara dan perkebunan rakyat.

4.5.2. Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan

- Perkebunan negara: masih menggunakan material genetik tanaman produksi PPKS Marihat generasi pertama yang rata-rata potensi produksinya pada tingkatan 20 ton TBS/ha/tahun, disamping adanya inefisiensi.
- Perkebunan rakyat: kurangnya pembinaan petani pekebun agar menggunakan bibit yang tersertifikasi, melakukan kultur teknis yang baik, serta melakukan panen dan penanganan pasca panen dengan baik.

4.5.3. Solusi Permasalahan

- Membentuk Dewan Sawit Indonesia yang merupakan badan pembuat kebijakan-kebijakan yang menentukan prioritas agribisnis kelapa sawit Indonesia. Anggota-anggota dari Dewan Pengurus terdiri dari Ketua, Direktur Jendral dan wakil-wakil dari pemerintah dan kalangan industri yang dinominasikan oleh Asosiasi Terkait, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.
- Menyediakan dana cash yang dipungut dari penjualan CPO yang difasilitasi oleh Dewan Sawit Indonesia untuk pembinaan petani pekebun, tata-niaga dan kebijakan harga, serta strategi pemasaran ke luar negeri.
- Menerapkan *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan perkebunan.

4.6. Kenaikan Upah Buruh yang Tidak Proporsional

4.6.1. Rumusan Permasalahan

Mengacu pada perkebunan sebagai unit usaha pertanian tanaman komersial skala besar, yang memiliki organisasi tenaga kerja yang banyak (padat karya) dengan pembagian kerja yang rinci, menggunakan lahan yang luas, teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, faktor kuantitas dan kualitas *human capital* menjadi penting. Dengan kata lain, mengelola perkebunan berarti mengelola *human capital*.

Kualitas *human capital* sangat menentukan keberhasilan suatu perkebunan. Mempersiapkan staf lapangan yang mampu mengelola pekerjaannya dengan baik, tidak dapat dilakukan secara *instant* karena *human capital* gaya perkebunan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan *human capital* di sektor industri. Faktor penghambat yang dijumpai dalam pelaksanaan pekerjaan baik di kebun maupun pabrik adalah faktor manusianya.

Agribisnis kelapa sawit Indonesia adalah industri yang padat karya dan sangat sensitif terhadap perubahan struktur upah. Kenaikan upah minimum propinsi yang tidak diimbangi kenaikan produktivitas kerja akan menyebabkan industri ini berkurang daya saingnya di tingkat global.

4.6.2. Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan

- Kenaikan upah minimum propinsi (UMP) setiap tahun yang menyebabkan struktur biaya meningkat dan melemahkan daya saing produk di tingkat global.
- Kenaikan UMP ini bersifat tidak proporsional karena tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas kerja.

4.6.3. Solusi Permasalahan

- Perbaiki manajemen kerja dengan menggeser porsi kenaikan komponen *fixed pay* menjadi komponen *variable pay*, sehingga setiap peningkatan beban upah dapat diserap oleh peningkatan produktivitas kerja.

4.7. Peran Pemerintah [cq. Dewan Komoditas(?)] Selaku Badan Penyangga Harga CPO untuk Pengembangan Industri Biodiesel.

4.7.1. Rumusan Permasalahan

Kenaikan harga minyak mentah internasional yang sempat mencapai level USD 75 per barrel, ditambah dengan melemahnya nilai tukar Rupiah, serta posisi Indonesia yang telah berubah menjadi *nett-importer* minyak (mineral) menyebabkan dampak kenaikan harga minyak mentah internasional menjadi semakin besar, dan menjadi tekanan kuat bagi pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran di satu sisi atau mengurangi subsidi BBM di sisi lainnya. Hasil akhirnya telah kita alami bersama: kenaikan harga BBM yang di atas 100% yang menyebabkan kehidupan kita menjadi terusik dan semakin kurang nyaman.

Alternatif pengganti BBM adalah biodiesel yang dikembangkan dari proses tran-esterifikasi CPO dengan methanol sehingga menjadi glycerol dan

methyl ester asam lemak (*biodiesel*). Secara kasar dari pengolahan 1.000 kg minyak sawit + 100 kg methanol akan menghasilkan 1.000 kg biodiesel murni + 100 kg glycerol (Bernardini, 2005). Biodiesel murni inilah yang digunakan sebagai campuran biodiesel-10 (10% biodiesel + 90% solar). Teknologi ini sudah berhasil dikembangkan oleh BPPT dan PPKS Medan pada skala laboratorium dan pilot proyek. Manfaat penggunaan biodiesel terhadap lingkungan sangat nyata dalam rangka menurunkan dampak pemanasan global, mengurangi emisi gas buang, memperkecil ketergantungan pada BBM mineral dan memberikan dampak positif bagi pertanian. Beberapa penelitian memperkirakan penggunaan 1 kg biodiesel akan mengurangi produksi 3 kg CO₂ bila dibandingkan BBM mineral. Biodiesel sangat ektrim rendah dalam kandungan sulfur, dan memiliki efek pelumasan tinggi serta cepat tenurai di alam secara alamiah (*European Biodiesel Board*, 2005).

Dalam seminar GAPKI di Bali 17-18 November 2005, Krisnamurthi memberikan beberapa catatan mengenai arah dan agenda pengembangan sawit di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah biodiesel. Biofuel berbahan baku sawit diposisikan untuk mengganti 20% solar dengan arah pemanfaatan B-20 (pencampuran maksimum 20% biodiesel sawit dalam solar untuk bahan bakar kendaraan). Apa agenda kongkrit untuk pengembangan biodiesel sawit? Bagaimana pemosisian untuk menjaga keseimbangan sawit untuk bahan makanan dan bahan bakar? Pada tingkatan harga solar di atas Rp 6.000,- per liter, biodiesel akan layak diproduksi secara besar-besaran dengan asumsi harga bahan baku (CPO) pada level USD 350 per ton.

4.7.2. Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan

Komponen utama biaya produksi biodiesel adalah harga bahan baku. Sesuai dengan keseimbangan harga yang dipengaruhi faktor penawaran dan permintaan, pada kondisi pasar CPO yang bersaing sempurna, kenaikan permintaan CPO karena adanya faktor permintaan industri biodiesel akan merubah keseimbangan pasar dan menggeser keseimbangan harga CPO internasional ke atas. Bila hal ini terjadi, bisnis biodiesel akan mati secara prematur karena mahalnya bahan baku akan menyebabkan harga jual biodiesel tidak kompetitif lagi.

Faktor lain adalah monopoli Pertamina dalam distribusi BBM. Pengoplosan biodiesel dengan solar Pertamina dan pendistribusian Biodiesel-10

dikembangkan secara besar-besaran. UU Migas telah mengatur masalah privatisasi sektor hilir perminyakan, tetapi aturan pelaksanaannya masih perlu diperjelas. Menghadapi dua permasalahan besar ini, maka dapatlah dipahami para pengusaha biodiesel bersifat *wait and see* untuk masuk ke industri ini.

4.7.3. Solusi Permasalahan

Pemerintah membentuk Dewan Sawit Indonesia yang memiliki kemampuan keuangan dari dana cash untuk melakukan stabilisasi harga CPO dan memberikan jaminan pasokan bahan baku CPO dengan harga kesepakatan pada periode tertentu kepada industri biodiesel. Hal ini akan memberikan kepastian harga bahan baku dan mempermudah pelaku industri biodiesel melakukan kalkulasi ekonomi dan menjalankan industrinya.

Dibuat MoU antara Asosiasi Industri yang mewakili kepentingan pengusaha biodiesel dengan Pertamina (difasilitasi oleh Dewan Sawit Indonesia) untuk *joint operation* distribusi dan pemasaran Biodiesel-10 di seluruh SPBU Pertamina. Pemerintah melalui kementerian terkait mengeluarkan kebijakan untuk wajib menggunakan Biodiesel-10 sebagai pengganti solar guna menurunkan kadar emisi gas buang kendaraan bermotor di Indonesia (sesuai ratifikasi Protokol Kyoto).

DAFTAR PUSTAKA

- Bernardini, C.M. 2005. Biodiesel Production. C.M. Bernardini Plants and Technologies for the Fats & Oils Industry. 22p.
- Chandra, A.C. 2005. Indonesia dan Akses Pasar Non-Pertanian WTO. Institute for Global Justice. Jakarta. 72p.
- European Biodiesel Board. 2005. About Biodiesel. <http://www.ebb-eu.org/biodiesel.php>
- Pahan, I., D.M. Devi, E. Setyawan, F. Subhiansyah, Irwandi, R. Sunandar, dan R.Z. Hidayati. 2005. Agribisnis Kelapa Sawit Indonesia. Magister Manajemen Agribisnis, Sekolah Pasca Sarjana. IPB. Bogor. 23p. (Tugas SAG, *unpublished*).
- _____. 2004. Kiat Keberhasilan Bisnis Sepanjang Masa. Bagaimana *Human Capital* Berperan dalam Meningkatkan Nilai Para Pemegang Saham. PT Indeks, Kelompok Gramedia. Jakarta. 320p+xxi.
- _____ dan E. Lukas. 2004. Pembangunan Agroindustri Kelapa Sawit yang Berkesinambungan (*Development of Sustainable Oil Palm Agroindustry*). Makalah untuk Menteri Perindustrian pada saat kunjungan dinas ke PT Asian Agro Agung Jaya, Marunda (Asian Agri Int'l) pada tanggal 28 Oktober 2004. Jakarta. 15p.
- _____. 2005. Sebuah Pemikiran: Pola Peremajaan Areal Plasma dari Segi Pembinaan Petani, Ketersediaan Modal dan Mengatasi Kesenjangan Pendapatan. Prosiding Seminar Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat, 15-16 April 2005: 126-132. Pekanbaru
- Koto, H.A. 1989. Measurement of technology level on agricultural production in term of energy consumption. *Proc. 2nd Joint Sem. on Agric. Eng. and Tech.*: 153-160. Bogor.
- Krisnamurthi, B. 2005. Beberapa Catatan Mengenai Arah dan Agenda Pengembangan Sawit Indonesia. Makalah Seminar Nasional Kelapa Sawit, Bali 17-18 November. GAPKI. 9p.
- Sa'id, E.G. dan A.H. Intan. 2001. Manajemen Agribisnis. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. 152p.

- Soehardjo, A. 1997. Sistem Agribisnis dan Agroindustri. Makalah Seminar. MMA-IPB. Bogor.
- Suharto, R. 2004. Peranan Industri Minyak Sawit Dalam Ekonomi Indonesia. Komisi Minyak Sawit Indonesia. Jakarta. 33p. (*unpublished*).
- Pangudijatno, G., A. Panjaitan dan K. Pamin. 1985. Potensi produksi kelapa sawit pada berbagai kelas kesesuaian lahan. *Bul. Perk.BPP Medan* 16(4):159-168.

Tabel Lampiran 1. Kriteria kesesuaian lahan untuk pengusahaan kelapa sawit
(Pangudijatno, Panjaitan dan Pamin, 1985)

Unsur Kemampuan	S1 (KL tinggi)	S2 (KL sedang)	S3 (KL terbatas)	N (tidak sesuai)
Zone agroklimat (Oldeman)	A : 9/2 B1: 7-9/2	B2: 7-9/2-3 C1: 5-6/2	D1: 3-4/2 C2: 5-6/2-3	D2: 3-4/2-3 D3: 4-6/6 E1: 3/2 E2: 3/2-3 E3: 3/4-6
Ketinggian dari permukaan air laut	25 - 200 m	200 - 300 m	300 - 400 m	< 25 m > 400 m
Bentuk daerah dan lereng	datar-ombak	ombak-gelombang	gelombang-bukit	bukit-gunung
	< 10% (4.5°)	10-22% (4.5°-10°)	22-50% (10°-22.5°)	> 50% (>22.5°)
Batuan di permukaan dan di dalam tanah	< 10%	10-25%	25-50%	>50%
Kedalaman solum tanah	> 100 cm	50-100 cm	25-50 cm	< 25 cm
Kedalaman air tanah	> 100 cm	50-100 cm	25-50 cm	< 25 cm
Tekstur tanah	lempung berdebu	liat	liat berat	liat sangat berat
	lempung berpasir	liat berlempung	pasir berliat	pasir kasar
	lempung liat	lempung berpasir	pasir berdebu	
	liat berpasir		pasir berlempung	
Struktur tanah	remah kuat	remah sedang	gumpal lemah	tak berstruktur
	gumpal sdg.	gumpal sdg.		masif
Konsistensi tanah	sgt. gembur tidak lekat	gembur agak lekat	teguh/keras lekat	sgt. teguh sgt. keras
Kelas drainase	sedang	agak cepat	cepat	sgt. cepat
		agak lambat	lambat	sgt. lambat
				tergenang
Erodibilitas	sgt. rendah	rendah/sdg.	agak tinggi	sgt. tinggi
Kemasaman tanah (pH)	5.0 - 6.0	4.0 - 4.9	3.5 - 3.9	< 3.5
		6.1 - 6.5	6.6 - 7.0	> 7.0
Kesuburan tanah	tinggi	sedang	rendah	sgt. rendah